

**PEKERJAAN ADMINISTRATIF  
BAGIAN STAF PELAYANAN  
SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDUNG**



**LAPORAN PRAKTIK KERJA**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat  
untuk memperoleh predikat Ahli Madya**

**Oleh :**

**Tiffany Valeria Alexis Hermanto**

**5031801039**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN  
Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT No.  
6885/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2020  
BANDUNG  
2021**

**ADMINISTRATIVE DUTIES ON  
RESEARCH PERMIT SERVICE STAFF  
AT THE NATIONAL UNITY  
AND POLITICAL AGENCY  
OF BANDUNG CITY**



**INTERNSHIP REPORT**

**This report is made to fulfill the requirement of the  
Diplome III Business Management Program**

**By :**

**Tifany Valeria Alexis Hermanto**

**5031801039**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF ECONOMICS  
DIPLOME III BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM  
Accredited based on the decree of BAN – PT No. 6885/SK/BAN-  
PT/Akred/Dpl-III/XI/2020  
BANDUNG  
2021**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN**



**PEKERJAAN ADMINISTRATIF  
BAGIAN STAF PELAYANAN  
SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDUNG**

**Nama : Tifany Valeria Alexis Hermanto**

**NPM : 5031801039**

**PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA**

**Bandung, 13 Agustus 2021**

**Ketua Program Studi DIII Manajemen Perusahaan**

**Nina Septina, SP., MM.**

**Dosen Pembimbing**

**Lilian Danil, SE., MM.**

**Dosen Penguji**

**Dr. Rr. Ida Nuraida, SE., MM.**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Tifany Valeria Alexis Hermanto  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Juli 1999  
Nomor Pokok Mahasiswa : 5031801039  
Program Studi : Diploma III Manajemen Perusahaan UNPAR

## JUDUL

### PEKERJAAN ADMINISTRATIF BAGIAN STAF PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG

Dengan,  
Pembimbing : Lilian Danil, SE., MM.

## SAYA NYATAKAN

Adalah benar – benar karya tulis sendiri;

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU. No. 20 Tahun 2003:  
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70 : Lulusan perguruan tinggi yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200 Juta.

Bandung,  
Dinyatakan tanggal : 5 Juli 2021  
Pembuat pernyataan : Tifany  
Valeria  
A. H.



(Tifany Valeria Alexis Hermanto)

## ABSTRAK

Penulis telah melaksanakan praktik kerja di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Instansi berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117. Penulis telah melakukan praktik kerja selama masing – masing 140 jam kerja *work from office* maupun *work from home* yang dimulai dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 30 April 2021 dan dengan waktu kerja yaitu 8 jam per hari pada hari Senin sampai dengan Kamis. Bidang praktik kerja penulis adalah bidang administrasi perusahaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktik kerja adalah membuat surat keterangan penelitian secara daring dan secara luring. Pekerjaan berikutnya adalah penulis menghancurkan surat, formulir, dan berkas yang sudah tidak layak untuk dipakai dan mencetak dan menggandakan lembar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan yang Diberikan. Masalah yang penulis hadapi selama melaksanakan praktik kerja adalah komputer yang digunakan untuk membuat surat keterangan penelitian membutuhkan waktu yang lama untuk membuka program *Mailings* pada *Microsoft Word* sehingga *Microsoft Word* seringkali tidak merespon tindakan yang diperintahkan, hal ini tentunya menghambat pelaksanaan pekerjaan, surat keterangan bulan Januari 2021 pada komputer tidak dapat ditemukan karena data – data pada bulan Januari hilang pada saat memindahkan data ke komputer survei/wawancara, dan sulitnya menentukan urutan pemohon yang datang ketika jumlah pemohon sudah cukup banyak karena sistem mengantri yang kurang jelas.

Penulis menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan administrasi pada bagian pelayanan surat keterangan penelitian sudah terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Kegiatan tersebut pun sudah sesuai dengan teori – teori yang ada. Penulis menyarankan untuk permasalahan yang ada, sebaiknya komputer yang digunakan untuk membuat surat keterangan penelitian diperhatikan dan dipelihara secara rutin agar komputer tidak lambat dalam merespon perintah. Apabila memungkinkan, sebaiknya surat – surat yang tersimpan di komputer disimpan juga dengan metode *Cloud Computing* atau komputasi awan atau menggunakan *Hard Disk* atau *Flash Disk* agar surat – surat tersebut memiliki cadangan. Apabila memungkinkan, sebaiknya menggunakan kartu yang berisi angka yang kemudian diberikan kepada pemohon untuk mengantri. Kartu tersebut dapat ditukarkan dengan surat keterangan penelitian pada staf pelayanan surat keterangan penelitian. Hal ini dapat membuat antrian menjadi terkendali.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kesempatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja yang berjudul “Pekerjaan Administratif bagian Staf Pelayanan Surat Keterangan Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung”. Laporan praktik kerja ini ditujukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis mendapat banyak sekali pengalaman dan relasi baru selama menyelesaikan praktik kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang penulis kasihi yaitu Heru Hermanto dan Ailia Pujiarto karena selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Budiana Gomulia, Dra., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Nina Septina, SP., MM selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dianta Hasri Natalius Barus ST., MM selaku dosen wali penulis.
4. Ibu Lilian Danil, SE., MM selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dalam menyusun laporan praktik kerja ini dengan selalu memberikan motivasi, saran, dukungan dan arahan yang sangat bermanfaat.
5. Ibu Dr. Rr. Ida Nuraida, SE., MM., Ibu Dr. Elvy Maria Manurung, SE., Ak. MT., Bapak Ronny Trian Surbakti, S.IP., MM., Ibu Intan Megafany SE., MM., Ibu Kurweni Ukar, Dra., Ak., M.Kom., dan seluruh dosen yang sudah membimbing serta mengajar penulis selama masa perkuliahan di DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan.

6. Ibu Leoni Anastasia Guswanti Meliala, A.Md., selaku bagian administrasi tata usaha DIII Manajemen Perusahaan yang telah membantu penulis dalam hal administratif selama masa perkuliahan hingga sampai dengan menyelesaikan laporan praktik kerja ini.
7. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Drs. H. Bambang Sukardi, M. Si dan Bapak Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Drs. Inci Dermaga Mustawan A., M.A.P yang telah yang telah menerima penulis untuk melaksanakan praktik kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
8. Bapak Andi Cahyanto, Bapak Brury, dan Bapak Febri selaku pembimbing penulis selama melaksanakan praktik kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
9. Seluruh staf dan rekan – rekan yang berkerja di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang telah menerima, membimbing dan memberikan semangat selama penulis melaksanakan praktik kerja.
10. Delvi L. Hokeng, Auriezyka Nurfenita, Louis Martinus, Regy Peter, M. Said Hikam, dan seluruh rekan – rekan Angkatan 2018 serta Angkatan di atas maupun di bawah penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan selama kuliah dan pengalaman yang telah dilalui bersama serta atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Nerissa Rosalia, Gabriel Vera Ovia, Mega Davita, Ivana Ardelia, Nadila Natalia, dan Michael Septhian yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan dalam mengerjakan laporan praktik kerja.
12. Terima kasih kepada teman – teman Senat Mahasiswa dan teman – teman lainnya yang tidak dapat penuli sebutkan satu per satu.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dalam penulisan laporan praktik kerja ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis agar laporan praktik kerja ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang berkepentingan.

Bandung, 28 Juni 2021

Penulis

Tifany Valeria Alexis Hermanto

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Tempat dan Waktu Praktik Kerja.....	1
1.2. Bidang dan Pekerjaan Praktik Kerja .....	1
1.3. Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja .....	1
1.4. Profil Tempat Praktik Kerja .....	3
1.4.1. Sejarah Tempat Praktik Kerja .....	3
1.4.2. Struktur Organisasi .....	8
1.4.3. Kondisi Keuangan .....	14
1.4.4. Kegiatan Usaha.....	16
1.4.5. Gambaran Umum Ketenagakerjaan .....	19
BAB 2 PEMBAHASAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA.....	22
2.1. Uraian Pekerjaan ( <i>Job Description</i> ).....	22
2.2. Proses dan Prosedur Pelaksanaan Praktik Kerja .....	23
2.3. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja.....	45
2.4. Relevansi Teori dengan Praktik Kerja .....	54
2.4.1. Membuat Surat Keterangan Penelitian secara Daring.....	55
2.4.2. Membuat Surat Keterangan Penelitian secara Luring .....	57
2.4.3. Menghancurkan Surat, Formulir, dan Berkas yang sudah Tidak Layak untuk Dipakai .....	58
2.4.4. Mencetak dan Menggandakan Lembar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) .....	59
2.5. Masalah dalam Praktik Kerja .....	59

BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
3.1. Kesimpulan.....	62
3.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 RINGKASAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021 .....	14
TABEL 1.2 DATA PEJABAT STRUKTURAL BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG TAHUN 2019 .....	20
TABEL 2.1 JAM KERJA DI BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG .....	45
TABEL 2.2 JAM KERJA <i>WORK FROM HOME</i> .....	45
TABEL 2.3 KOSTUM KERJA DI BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG .... .....	46
TABEL 2.4 JADWAL KEGIATAN PRAKTIK KERJA .....	46

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 LOGO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK .....	5
GAMBAR 1.2 KANTOR BAKESBANGPOL.....	7
GAMBAR 1.3 RUANG PELAYANAN SURAT KETERANGAN BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG .....	8
GAMBAR 1.4 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG .....	9
GAMBAR 1.5 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG TAHUN 2021 .....	10
GAMBAR 1.6 KEGIATAN KOMINDA KOTA BANDUNG .....	17
GAMBAR 1.7 KERANGKA BERPIKIR KESBANGPOL .....	18
GAMBAR 2.1 <i>FLOWCHART</i> MEMBUAT SURAT KETERANGAN PENELITIAN SECARA DARING.....	25
GAMBAR 2.2 TAMPILAN DATA – DATA YANG DIUNGGAH OLEH PEMOHON PADA <i>GOOGLE</i> FORMULIR .....	26
GAMBAR 2.3 MAP KERTAS UNTUK MENYIMPAN SURAT YANG SUDAH DIGABUNGAN DENGAN DATA PEMOHON LAINNYA. ....	27
GAMBAR 2.4 JENIS KERTAS YANG DIGUNAKAN BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG UNTUK MENCETAK SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	28
GAMBAR 2.5 <i>FLOWCHART</i> MEMBUAT SURAT KETERANGAN PENELITIAN SECARA LURING DI BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG .....	31
GAMBAR 2. 6 FORMULIR DATA DIRI YANG PERLU DIISI OLEH PEMOHON.....	32
GAMBAR 2.7 MESIN CETAK <i>EPSON L565</i> .....	33

GAMBAR 2.8 ALAT PENGHUBUNG KOMPUTER DENGAN MESIN CETAK <i>EPSON LP565</i> .....	34
GAMBAR 2.9 MAP BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG.....	35
GAMBAR 2.10 GAMBAR SURAT KETERANGAN PENELITIAN YANG DICETAK DENGAN FORMAT HITAM PUTIH.....	36
GAMBAR 2.11 GAMBAR SURAT KETERANGAN PENELITIAN YANG DICETAK DENGAN FORMAT BERWARNA.....	38
GAMBAR 2.12 <i>FLOWCHART</i> MENGHANCURKAN SURAT, FORMULIR, DAN BERKAS YANG SUDAH TIDAK LAYAK UNTUK DIPAKAI.....	39
GAMBAR 2.13 MESIN PENGHANCUR KERTAS <i>KOSTAL KS-1245</i> .....	40
GAMBAR 2.14 <i>FLOWCHART</i> MENCETAK DAN MENGGANDAKAN LEMBAR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM).... .....	41
GAMBAR 2.15 GAMBAR LEMBAR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) YANG DIGUNAKAN OLEH BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG .....	42
GAMBAR 2.16 TAMPILAN KOLOM UTAMA PADA <i>GOOGLE</i> FORMULIR.....	43
GAMBAR 2.17 MESIN PENGGANDA DOKUMEN <i>CANON IR-2004N</i> ....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN DAFTAR SIMBOL .....	68
LAMPIRAN FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (1) .....	69
LAMPIRAN FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (2) .....	70
LAMPIRAN FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (3) .....	71
LAMPIRAN FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (4) .....	72
LAMPIRAN FORMULIR KEHADIRAN PRAKTIK KERJA (5) .....	73
LAMPIRAN KARTU BIMBINGAN .....	74
LAMPIRAN PENILAIAN PRAKTIK KERJA .....	75
LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PRAKTIK KERJA DI BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG.....	76
LAMPIRAN SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PRAKTIK KERJA DI BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG... .....	77

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Tempat dan Waktu Praktik Kerja**

Praktik kerja ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau disingkat menjadi Bakesbangpol Kota Bandung. Instansi berlokasi di Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

Penulis mulai melakukan praktik kerja pada tanggal 1 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 30 April 2021. Waktu kerja berlangsung selama 8 jam pada hari Senin sampai dengan Jumat. Total jam kerja *work from office* dan *work from home* penulis adalah masing - masing sebanyak 140 jam kerja, sehingga total jumlah jam praktik kerja yaitu 280 jam.

### **1.2. Bidang dan Pekerjaan Praktik Kerja**

Bidang praktik kerja yang penulis lakukan di Bakesbangpol Kota Bandung adalah bidang administrasi perusahaan. Hal ini sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.

Instansi menempatkan penulis pada posisi staf pelayanan surat keterangan penelitian. Penulis diberikan tugas – tugas seperti membuat surat keterangan baik secara daring maupun luring, menghancurkan surat, formulir, dan berkas yang sudah tidak layak untuk dipakai, dan mencetak serta menggandakan formulir kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja**

Tujuan dari praktik kerja yang penulis lakukan di Bakesbangpol Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami cara membuat surat keterangan penelitian secara daring.

2. Untuk mengetahui dan memahami cara membuat surat keterangan penelitian secara luring.
3. Untuk mengetahui dan memahami cara menghancurkan surat, formulir, dan berkas yang sudah tidak layak untuk dipakai.
4. Untuk mengetahui dan memahami cara mencetak dan menggandakan lembar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan yang Diberikan.

Kegunaan praktik kerja selama penulis melaksanakan kegiatan tersebut di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah :

1. Bagi penulis
  - a. Umum : praktik kerja ini memiliki manfaat sebagai persiapan awal memasuki dunia pekerjaan yang sesungguhnya seperti pengalaman pribadi dalam bertanggung jawab atas pekerjaan atau tugas – tugas yang diberikan sebelum penulis mengakhiri masa perkuliahan Diploma III Manajemen Perusahaan di Universitas Katolik Parahyangan.
  - b. Khusus : praktik kerja ini memiliki manfaat untuk mengaplikasikan keterampilan dan menambah pengetahuan ilmu administrasi perkantoran yang telah didapatkan oleh penulis pada bagian administrasi di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
2. Bagi instansi

Hasil pelaksanaan praktik kerja yang penulis lakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi instansi dalam hal penerapan manajemen perkantoran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
3. Bagi pembaca

Informasi dari hasil praktik kerja ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan dan referensi untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu manajemen serta administrasi perkantoran bagi pembaca.

#### **1.4. Profil Tempat Praktik Kerja**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP) atau yang selanjutnya disingkat menjadi Bakesbangpol Kota Bandung adalah salah satu Badan Daerah Kota Bandung yang memiliki fungsi membantu urusan pemerintahan di wilayah daerah yang berkaitan tentang kesatuan bangsa dan politik. Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden namun dilaksanakan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan tujuan melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **1.4.1. Sejarah Tempat Praktik Kerja**

Bakesbangpol Kota Bandung didirikan berdasarkan adanya peraturan daerah dan peraturan walikota yang menyebutkan bahwa Bakesbangpol diperlukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPPM) Kota Bandung merupakan nama yang digunakan sebelum menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. BKBPPM dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian pembentukan dan susunan organisasinya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007.

Seiring berkembangnya zaman dan diperlukannya perubahan pada Peraturan Daerah, maka pada tahun 2013 pemerintah daerah mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah. Beberapa ketentuan yang diubah menurut Perda Nomor 4 Tahun 2013 adalah :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah. Pasal 2 menjelaskan tentang terbentuknya Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
  - f. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Paragraf 3 Pasal 6 menjelaskan tentang perubahan nama Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPPM) menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) beserta tugas pokok dan fungsinya.
3. Ketentuan Lampiran III dihapus.

Perubahan yang terdapat pada Perda Nomor 4 Tahun 2013 membuat Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPPM) berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung. Tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung diatur di dalam Peraturan Walikota No. 295 Tahun 2013.

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Lembaga Teknis Daerah berubah nama menjadi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, Badan Daerah Kota Bandung terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tipe A
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe A
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tipe A

4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tipe A
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung diatur di dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 yang berlaku hingga saat ini. Bakesbangpol Kota Bandung memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut :

- Visi Bakesbangpol Kota Bandung adalah terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis.
- Misi Bakesbangpol Kota Bandung adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih.
- Tujuan Bakesbangpol Kota Bandung adalah meningkatkan kualitas kinerja pembinaan kesatuan bangsa dan pendidikan politik.

Logo Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**GAMBAR 1.1**  
**LOGO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG**



Sumber : Kantor Bakesbangpol Kota Bandung, 2021

Logo Bakesbangpol Kota Bandung menggunakan logo Kota Bandung karena Bakesbangpol Kota Bandung merupakan sebuah perangkat daerah yang memiliki fungsi dan tugas di wilayah Kota Bandung. Bentuk – bentuk yang terdapat dalam Logo Bakesbangpol Kota Bandung memiliki makna dan arti sebagai berikut :

- a. Perisai yang menyerupai jantung diartikan sebagai senjata untuk melindungi diri dalam mencapai suatu tujuan, selain itu bentuk perisai juga diartikan sebagai perkakas perjuangan yang digunakan untuk menahan mara bahaya dan kesukaran.
- b. Gunung berwarna hijau yang bertumpu pada empat jajaran balok dengan latar berwarna kuning tersebut diartikan sebagai Gunung Tangkuban Perahu yang menjadi salah satu ciri khas dari Kota Bandung.
- c. Bidang horizontal bergelombang berwarna biru diartikan sebagai sebuah danau atau telaga. Bidang ini mengingatkan kita kepada asal – usul Kota Bandung yang pada zaman dahulu merupakan sebuah telaga atau danau.

Tulisan *Gemah Ripah Wibawa Mukti* pada pita yang terletak di bawah perisai memiliki arti tanah subur rakyat makmur. Kalimat yang ditulis dengan huruf latin berwarna hitam tersebut berasal dari Bahasa Kawi atau disebut juga dengan Bahasa Jawa Kuno. Arti dari warna yang terdapat pada logo berdasarkan situs <https://portal.bandung.go.id/lambang-dan-bendera> adalah sebagai berikut :

- a. Kuning (emas) memiliki arti kesejahteraan dan keluhungan.
- b. Hitam (sabel) memiliki arti kokoh, tegak, dan kuat.
- c. Hijau (sinopel) memiliki arti kemakmuran dan sejuk.
- d. Putih (perak) memiliki arti kesucian.
- e. Biru (azuur) memiliki arti kesetiaan.

Penulis melampirkan gambar Kantor Bakesbangpol Kota Bandung pada Gambar 1.2. dan ruang pelayanan surat keterangan pada Gambar 1.3.

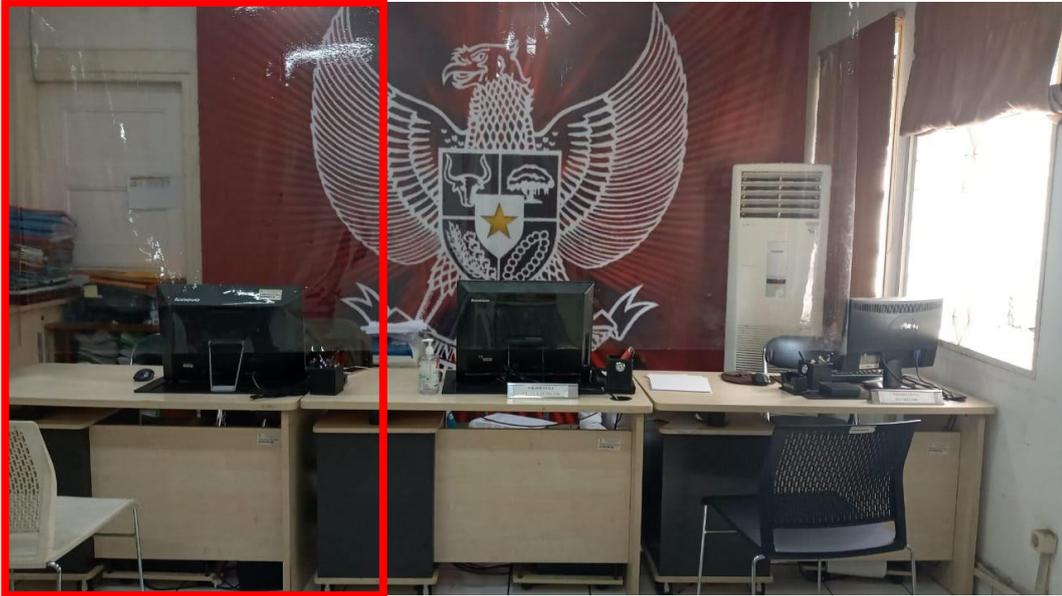
**GAMBAR 1.2**  
**KANTOR BAKESBANGPOL KOTA BANDUNG**



Sumber : Penulis, 2021

Gambar 1.3 adalah ruangan penulis melakukan kegiatan praktik kerja. Ruangan ini terdapat tiga buah komputer yang memiliki fungsi berbeda – beda. Komputer pada sebelah kiri merupakan komputer yang penulis gunakan untuk membuat surat keterangan penelitian baik secara luring maupun daring, sedangkan komputer di bagian tengah untuk membuat surat keterangan survei atau wawancara dan komputer sebelah kanan untuk membuat surat keterangan praktik kerja lapangan atau magang. Plastik mika antara komputer dan tempat duduk tamu merupakan salah satu bentuk protokol kesehatan yang dilakukan oleh Kantor Bakesbangpol Kota Bandung untuk mencegah penularan COVID-19.

**GAMBAR 1.3**  
**RUANG PELAYANAN SURAT KETERANGAN BAKESBANGPOL**  
**KOTA BANDUNG**

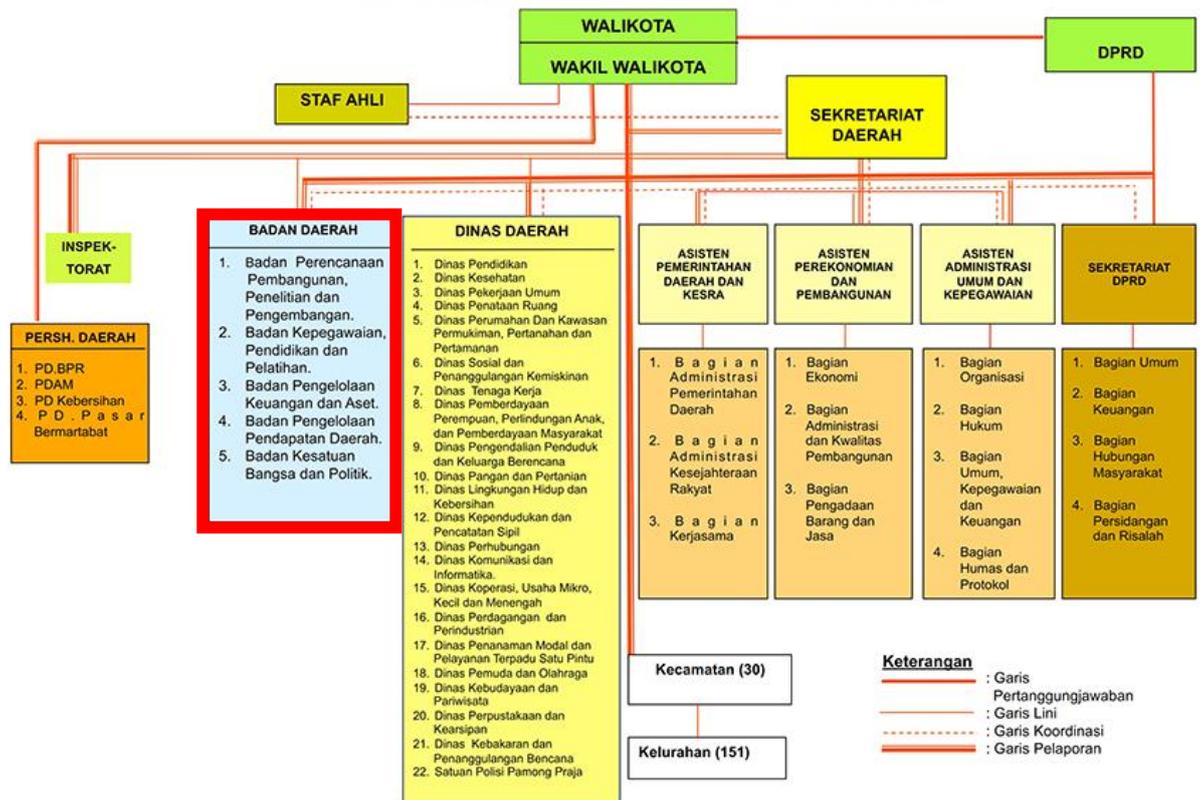


Sumber : Penulis, 2021

#### **1.4.2. Struktur Organisasi**

Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung berkedudukan di bawah Walikota namun melakukan pertanggungjawaban atas fungsinya kepada Sekretaris Daerah. Kedudukan Instansi Bakesbangpol Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.4 yang ditandai dengan bingkai berwarna merah.

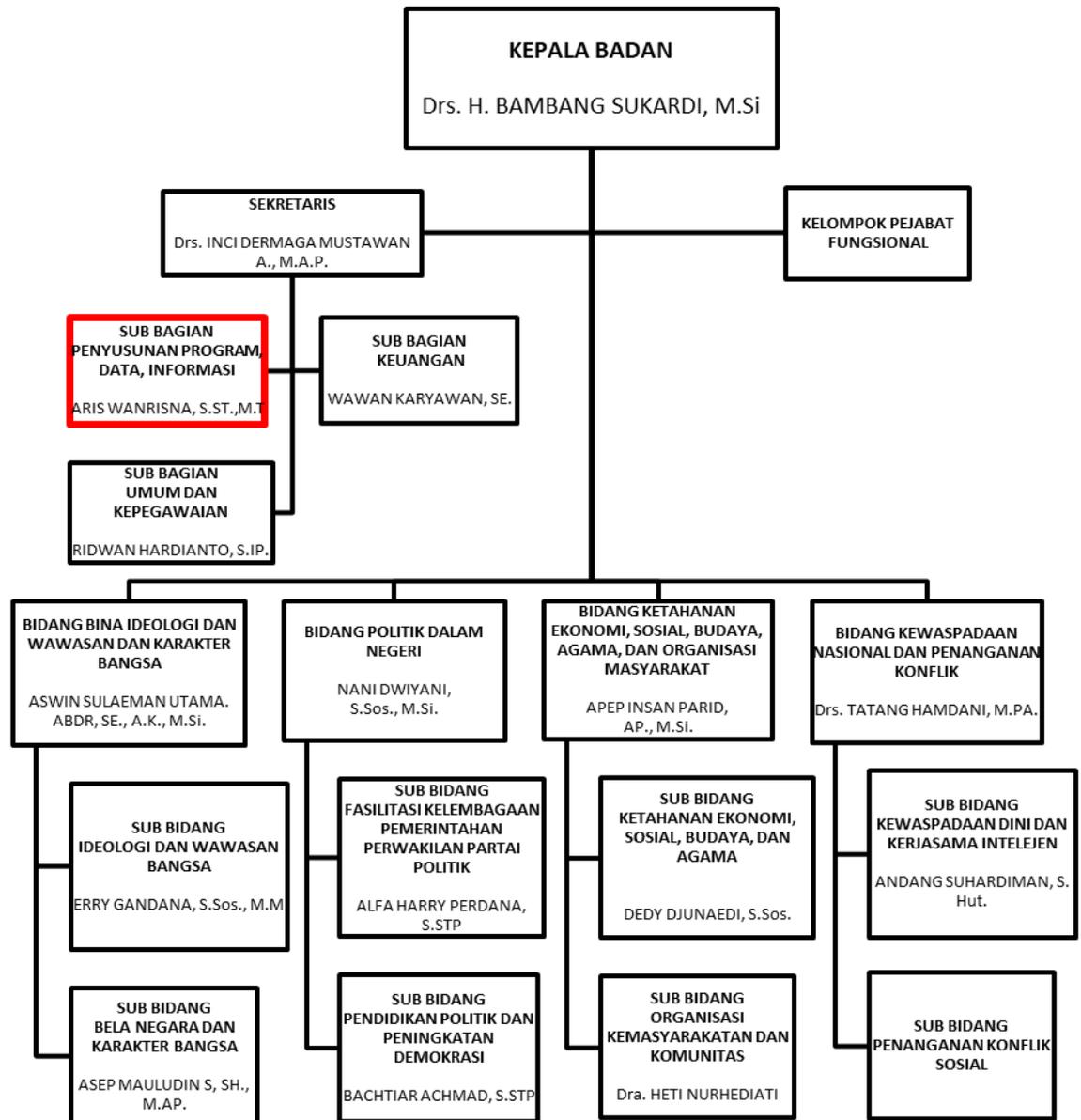
**GAMBAR 1.4**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH**  
**KOTA BANDUNG**



Sumber : <https://portal.bandung.go.id>, 2021

Struktur organisasi perusahaan/instansi digunakan untuk mengatur setiap individu atau kelompok dalam mengerjakan tugas atau wewenang yang diberikan, sehingga pekerjaan maupun tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan teratur dan sesuai dengan bidang dan kemampuan setiap individu dan kelompok. Salah satu keberhasilan suatu perusahaan/instansi dalam mencapai visinya adalah dengan adanya struktur organisasi yang disusun dengan baik. Setiap posisi yang terdapat pada struktur organisasi dapat dilihat pada bagan struktur organisasi perusahaan. Gambar 1.5 adalah bagan struktur organisasi yang menjelaskan hubungan dan kedudukan setiap bagian dan bidang yang ada di kantor Bakesbangpol Kota Bandung.

**GAMBAR 1.5**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN**  
**POLITIK KOTA BANDUNG TAHUN 2021**



Sumber : Kantor Bakesbangpol Kota Bandung, 2021

Susunan organisasi yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bandung berdasarkan Gambar 1.5 terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Kelompok Pejabat Fungsional

- c. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Data, dan Informasi
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan dan Karakter Bangsa, membawahi :
  - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Bangsa
  - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
  - a. Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan Partai Politik
  - b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
- f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat, membawahi :
  - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
  - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Komunitas
- g. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik, membawahi :
  - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelejen
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial

Penulis ditempatkan pada posisi staf pelayanan surat keterangan penelitian di sub bagian penyusunan program, data, dan informasi. Sub bagian penyusunan program, data, dan informasi ditandai dengan bingkai berwarna merah pada Gambar 1.5 di atas. Pimpinan sub bagian penyusunan program, data, dan informasi disebut dengan Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disingkat menjadi Kasubag. Kasubag menjalankan sebagian tugas Sekretaris pada lingkup masing – masing dengan dukungan fungsi seperti :

1. Penyusunan rencana dan program kerja.
2. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis.
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis.

5. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kasubag Penyusunan Program, Data, dan Informasi menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1406 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada staf sub bagian agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Badan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.
- d. Membina bawahan dengan cara memberikan motivasi agar produktivitas kerja meningkat dan karier bawahan dapat berkembang.
- e. Melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dan sistem informasi lingkup badan.
- f. Melaksanakan fasilitasi, pengordinasian, penyiapan dan penyusunan program rencana kegiatan badan.
- g. Melaksanakan fasilitasi, pengordinasian dan penyusunan program rencana kegiatan strategis badan.
- h. Menyiapkan bahan mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup badan.
- i. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja.
- j. Mengolah, menata, dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja.
- k. Melaksanakan pelayanan informasi publik.
- l. Menyeleksi dan pengujian data informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik.

- m. Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.
- n. Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi.
- o. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.
- p. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyusunan program, data, dan informasi
- q. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- r. Menyiapkan dan menyusun data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP, dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan badan.
- t. Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program, data, dan informasi.
- u. Membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup program, data, dan informasi.
- v. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- w. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4.3 Kondisi Keuangan**

Anggaran yang digunakan oleh Instansi Bakesbangpol Kota Bandung untuk saat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tabel 1.1 adalah ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021.

**TABEL 1.1**  
**RINGKASAN APBD KOTA BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<p><b>KOTA BANDUNG</b> <b>RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS</b> <b>PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2021</b></p>
--

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.300.827.453.188</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.700.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	69.286.809.600
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.885.582.468
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	512.655.061.120
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.255.786.584.793</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.418.235.485.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	837.551.099.793
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>24.000.000.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.000.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.580.614.037.981</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.677.081.544.918</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.724.824.499.901
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.552.332.072.172
5.1.04	Belanja Subsidi	79.943.159.300
5.1.05	Belanja Hibah	186.619.678.545
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	133.362.135.000
<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>823.450.911.365</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.714.730.674
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.100.385.870
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.769.950.759
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.195.711.990
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.670.132.072
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>21.473.019.673</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	21.473.019.673
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>33.750.000.000</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	33.750.000.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.555.755.475.956</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>24.858.562.025</b>

<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>26.849.185.812</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.849.185.812
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>26.849.185.812</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>51.707.747.837</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	27.707.747.837
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>51.707.747.837</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(24.858.562.025)</b>
6.3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>

Sumber : Lampiran I Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020, 2021

Anggaran yang digunakan oleh Bakesbangpol adalah sebesar 0,55% dari Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2021 atau sebanyak Rp36.622.644.507,00. Bakesbangpol menggunakan anggaran tersebut untuk menjalankan program – program yang sudah dirancang untuk 1 tahun ke depan menurut Lampiran III Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020. Program – program Bakesbangpol yang masuk ke dalam APBD adalah sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### **1.4.4. Kegiatan Usaha**

Bakesbangpol Kota Bandung melihat bahwa adanya penurunan terhadap pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan pada masyarakat sehingga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di Kota Bandung. Radikalisme dan adanya golongan masyarakat yang intoleran membuat suasana Kota Bandung menjadi tidak kondusif. Aksi demo yang tidak terprediksi pada saat menjelang tahun pemilu adalah salah satu contoh penyebab turunnya tingkat pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan pada masyarakat, sehingga perlu adanya program berupa penyuluhan atau forum untuk mengedukasi dan membimbing masyarakat agar pemahaman masyarakat bertumbuh dan suasana kota kembali kondusif. Kegiatan yang dilakukan Bakesbangpol untuk mencapai Kota Bandung yang kondusif adalah salah satunya pada saat Pilkada serentak pada tahun 2018 dan Pilpres serta Pileg tahun 2019, Bakesbangpol Kota Bandung berkoordinasi dengan pihak TNI, Polri, dan kejaksaan melalui Kominda (Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Aparatur Pemerintah dan Lintas Sektor Dalam Menjaga Kondusifitas Kota Bandung) untuk merancang strategi keamanan dan perlindungan masyarakat dalam mensukseskan kegiatan tersebut. *Output* yang dicapai dari kegiatan ini adalah Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 berjalan dengan aman dan lancar. Gambar 1.6 adalah gambar kegiatan Kominda Kota Bandung pada tahun 2019.

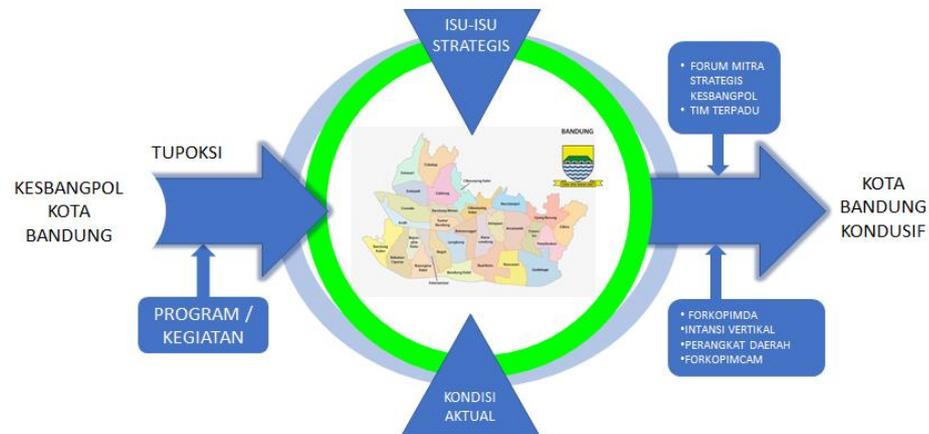
**GAMBAR 1.6**  
**KEGIATAN KOMINDA KOTA BANDUNG**



Sumber : <http://www.portal.kesbangpol.bandung.go.id>, 2021

Kota Bandung yang kondusif adalah *output* yang diharapkan dapat tercapai. Bakesbangpol mengadakan program/kegiatan yang sesuai untuk menangani setiap konflik yang terjadi di masyarakat dengan bantuan Forum Mitra Strategis Kesbangpol, Tim Terpadu, Forkopimda, Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, Forkopimcam untuk menangani isu – isu strategis seperti adanya jumlah ormas yang terus bertambah dan tidak terkendali setiap tahun, tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, serta konflik lainnya yang ada di tengah masyarakat Kota Bandung. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi dari Bakesbangpol Kota Bandung. Gambar 1.7 adalah gambar kerangka berpikir Bakesbangpol Kota Bandung.

**GAMBAR 1.7**  
**KERANGKA BERPIKIR KESBANGPOL KOTA BANDUNG**



Sumber : Kantor Bakesbangpol Kota Bandung, 2021

Bakesbangpol memiliki lima program/kegiatan yaitu :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program – program tersebut dapat berupa seminar, *workshop*, kunjungan langsung ke kelurahan/kecamatan maupun sekolah menengah atas dan sekolah tinggi, dan forum komunikasi bersama partai politik dan ormas. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Bandung adalah melayani publik seperti pembuatan surat keterangan. Pihak – pihak yang akan melaksanakan penelitian, survei/wawancara, dan PKL/magang pada instansi yang dikelola oleh pemerintah perlu mendapatkan izin dari Bakesbangpol Kota Bandung. Bakesbangpol Kota Bandung akan mengeluarkan surat keterangan penelitian, survei/wawancara, dan

PKL/magang dengan tujuan agar Bakesbangpol dapat memantau dan menindaklanjuti penyalahgunaan data dan informasi yang didapatkan oleh pihak – pihak yang melakukan penelitian, survei/wawancara, atau PKL/magang di instansi terkait.

#### **1.4.5. Gambaran Umum Ketenagakerjaan**

Tenaga kerja pada Bakesbangpol Kota Bandung merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Bakesbangpol Kota Bandung adalah sebanyak 48 orang, yang terdiri dari 12 orang PNS perempuan dan 36 orang PNS laki – laki. Persyaratan untuk menjadi PNS adalah sebagai berikut :

- a. Semua warga negara indonesia yang berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Untuk jabatan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden, batas usia paling tinggi adalah 40 tahun.
- b. Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih.
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta maupun pegawai (Badan Usaha Milik Daerah atau Negara).
- d. Tidak tergabung dalam kepengurusan partai politik atau terlibat dalam politik praktis.
- e. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Penulis melampirkan Tabel Data Pejabat Struktural di Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2019 menurut <http://data.bandung.go.id> pada Tabel 1.2 di bawah ini.

**TABEL 1.2 DATA PEJABAT STRUKTURAL BAKESBANGPOL  
KOTA BANDUNG TAHUN 2019**

Nama	Unit Kerja	Golongan Pangkat	TMT Golongan	Eselon	Nama Jabatan	TMT Jabatan	Pendidikan
Alfa Harry Perdana, SSTP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III/d	01 April 2015	IV.a	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	23 Maret 2017	D4
Asep Mauludin Suhandi, SH,M.A.P	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV/a	01 Oktober 2018	IV.a	Kepala Sub Bidang Pembauran dan Pelestarian Bhineka Tunggal Ika	10 Januari 2017	S2
Dedy Djunaedi, S.SOS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III/d	01 Oktober 2005	IV.a	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Seni Budaya	30 Juli 2019	S1
DRA. Heti Nurhediaty	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III/d	01 Oktober 2005	IV.a	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	10 Januari 2017	S1
Dra.Lusi Susilayani, M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV/b	01 April 2013	III.a	Sekretaris BKBP	03 Januari 2017	S2
Drs. Inei Dermaga Mustawan A, M.A.P	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV/a	01 April 2012	III.b	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya dan Ormas	06 Januari 2017	S1
Drs.Suherlan, M.Ag	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III/d	01 April 2019	IV.a	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial	10 Januari 2017	S2
Erry Gandana, S.Sos.,M.M	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III/d	01 Oktober 2018	IV.a	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi	10 Januari 2017	S2
Hentol Akhmad Ferdi Ligaswara, S.H., M.H.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV/c	01 April 2014	II.b	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21 Maret 2019	S2
Leonard, S.STP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III/c	01 April 2017	IV.a	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri	30 Juli 2019	D4
Nani Dwiyani,S.Sos.,M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV/a	01 Oktober 2013	IV.a	Kepala Sub Bidang Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	10 Januari 2017	S2
Ridwan Hardianto,S.IP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III/c	01 April 2016	IV.a	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini	14 Februari 2018	S1
Setiati Witorsa, SH	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	III/d	01 April 2005	IV.a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	10 Januari 2017	S1
Soni Bakhtiyar, S.Sos, M.Si	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV/a	01 April 2014	III.b	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	12 Juli 2019	S2

Sumber : <http://data.bandung.go.id>, 2021

Golongan pangkat yang dimiliki oleh seorang PNS berfungsi sebagai dasar penggajian. Golongan pangkat merupakan posisi yang menunjukkan tingkat tanggung jawab, kesulitan, dampak, dan persyaratan kealififikasi pekerjaan. Oleh sebab itu, PNS menerima gaji yang berbeda – beda sesuai dengan golongan pangkat yang dimilikinya. Kenaikan pangkat seorang PNS dapat terwujud dengan hasil kinerja yang baik yang dinilai oleh pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing – masing dan kemudian kenaikan pangkat tersebut disetujui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Jabatan adalah posisi yang terdapat pada struktur organisasi. Jabatan menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil menyebutkan bahwa jabatan PNS terdiri dari 3 buah jabatan yaitu :

a. Jabatan Administrasi (JA)

Jabatan administrasi memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

b. Jabatan Fungsional (JF)

Jabatan fungsional memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasar pada keahlian dan keterampilan tertentu.

c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jabatan pimpinan tertinggi adalah jabatan tinggi pada instansi pemerintah.